

**THE ROLE OF THE KOLAKA REGENCY ELECTION
SUPERVISORY AGENCY IN PREVENTING MONEY POLITICS IN
THE 2024 ELECTION**

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KOLAKA
DALAM PENCEGAHAN MONEY POLITIC PADA PEMILU 2024**

La Ode Dedihasriadi¹, Adhe Ismail Ananda^{2*}

¹Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia

^{2*}Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

*adhe.ananda@staf.undana.ac.id

Volume 4, Number 2, September 2025

Received: March 18, 2025 Accepted: March 18, 2025 Online Published: October 17, 2025.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the role of the Kolaka Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing the practice of money politics in the 2024 election and identify its inhibiting factors. This study uses a juridical-empirical method with a descriptive qualitative approach. Primary data was obtained through direct interviews with members of the Kolaka Regency Bawaslu, while secondary data came from official documents, laws and regulations, and related literature. The results of the study show that although Bawaslu has carried out its supervisory duties, challenges such as limited human resources, low legal awareness of the community, and obstacles in proving the practice of money politics are significant obstacles in prevention. This study provides recommendations to increase the capacity of Bawaslu and strengthen the role of the community in reporting violations.

Keywords : Bawaslu; Muney Politics; Election; Prevention.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kolaka dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu telah

menjalankan tugas pengawasan, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kendala pembuktian praktik politik uang menjadi hambatan signifikan dalam pencegahan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas Bawaslu serta memperkuat peran masyarakat dalam pelaporan pelanggaran.

Kata Kunci : Bawaslu; Politik Uang; Pemilu; Pencegahan.